

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan), maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon:

1. *Input*

- a. Komitmen Pemerintah Kota dan *Stakeholders* Lainnya Terhadap Permasalahan Sampah: Pemerintah Kota Cirebon telah berkomitmen akan permasalahan sampah, sedangkan untuk *stakeholders* lainnya masih terdapat perusahaan dan pelaku usaha yang belum menjalankan komitmen terhadap permasalahan sampah sehingga belum berkolaborasi dalam program bina lingkungan.
- b. Kejelasan peraturan perundang-undangan: Peraturan perundang-undangan tentang kolaborasi dalam pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *stakeholders* lainnya sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. *Stakeholders* yang sudah berkolaborasi berarti sudah memahami seluruh peraturan yang ada, sedangkan *stakeholders* yang belum berkolaborasi ada yang sudah memahami tetapi bersikap seolah-olah tidak tahu akan peraturan tersebut sehingga tidak melakukan kolaborasi.

- c. Saling Ketergantungan antara Pemerintah Kota dengan *Stakeholders* Lainnya: Terdapat saling ketergantungan yang timpang di mana Pemerintah Kota Cirebon dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan banyak bergantung kepada para perusahaan. Saling ketergantungan antara DLH Kota Cirebon dengan *stakeholders* lainnya sudah berjalan hanya dengan pihak yang sudah berkolaborasi, tetapi masih belum optimal karena masih banyak pelaku usaha yang tidak bergantung untuk pengangkutan sampahnya dengan DLH Kota Cirebon.
- d. Ketercukupan Sumber-sumber Daya yang dipunyai oleh Pemerintah Kota:
- Sumber Daya Manusia: Sudah optimal karena jumlah pegawai telah memadai.
 - Anggaran: Belum optimal karena belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan sampah.
 - Kewenangan: Pembagian kewenangan antar seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
 - Sarana dan Prasarana : Belum optimal karena jumlahnya belum memadai dan kondisi sarana dan prasarana pun sudah memakan usia.

2. *Process*

- a. Komunikasi Berupa Dialog Tatap Muka antara Pemerintah Kota dengan *Stakeholders* Lainnya: Sudah berlangsung dan dapat dipertahankan melalui pertemuan pra pelaksanaan, pertemuan evaluasi pelaksanaan, dan pertemuan hasil pelaksanaan.

- b. Membangun Kepercayaan Antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *Stakeholders* Lainnya: Telah berjalan cukup optimal yang dilakukan melalui komunikasi formal dan informal yang intens serta transparansi laporan kinerja.
- c. Komitmen terhadap Proses yang Dilakukan Antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *Stakeholders* Lainnya: Komitmen terhadap proses dari Pemerintah Kota Cirebon diwujudkan dengan DLH yang berupaya mengajak para pelaku usaha agar dapat melakukan perjanjian kerjasama dalam hal Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan serta berusaha untuk mengajukan proposal kepada para perusahaan agar mendapatkan bantuan berupa sarana prasarana dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Selanjutnya, komitmen terhadap proses dari *stakeholders* lainnya dibuktikan dengan adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana dari perusahaan dengan menggunakan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, terdapat sejumlah 43 pelaku usaha yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Namun, masih banyak pula perusahaan atau *stakeholders* lainnya yang belum berkomitmen untuk berkolaborasi dengan DLH Kota Cirebon
- d. Pemahaman Bersama yang Tercipta Antara Pemerintah Kota dengan *Stakeholders* Lainnya: Sudah berjalan dengan cukup baik yang dilakukan dengan menyamakan visi dan misi antar aktor yang terlibat untuk mengatasi permasalahan sampah sehingga dapat tumbuh pemahaman akan pentingnya

kolaborasi pengelolaan sampah. DLH Kota Cirebon dan *stakeholders* lainnya juga turut melakukan pemberian sosialisasi kepada masyarakat, meskipun terdapat kendala terkait sulitnya merubah pola pikir masyarakat akan urgensi menjaga lingkungan untuk dapat terbebas dari sampah.

- e. Kemampuan Pemimpin dalam Mengkolaborasikan Dengan *Stakeholders* Lainnya pada Pengelolaan Sampah: Kemampuan pimpinan dari DLH Kota Cirebon dalam menjalin hubungan kolaborasi dengan *stakeholders* lainnya sudah cukup baik dengan berbagai inovasi. Kemampuan ketua bank sampah yang menjalankan program bank sampah serta para pimpinan pelaku usaha kepada masyarakat telah berlangsung dengan baik. Namun, masih banyak ketua RW yang kurang aktif dan inisiatif akan program bank sampah.
- f. Tata Kelola pada Proses Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah: Seluruh pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah, yaitu dari melakukan Perjanjian Kerjasama pengelolaan sampah, pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana dari perusahaan dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan program bank sampah oleh *stakeholders* lainnya sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan proses, aturan, dan alur yang berlaku.

3. *Outcomes*

- 1) Hasil-Hasil Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah Dilihat Secara Kuantitas (Jumlah)
 - a. Hasil Kolaborasi Berupa Kuantitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah: Setelah dilakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah jumlah

sarana dan prasarana mengalami peningkatan. Akan tetapi, jumlah tersebut belum mampu menciptakan pengelolaan sampah yang optimal.

- b. Hasil-Hasil Kolaborasi Berupa Target dan Realisasi dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang Tercantum Dalam Perwal: Untuk pengurangan sampah belum mampu mencapai target, sedangkan untuk penanganan sampah sudah mampu mencapai target.
- 2) Hasil-hasil kolaborasi dalam pengelolaan sampah dilihat secara kualitas (mutu).
- a. Kualitas (Mutu) Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon: Hasil peningkatan kualitas pengelolaan sampah dinilai belum signifikan.
 - b. Perbaikan Kualitas Kebersihan Lingkungan: Kolaborasi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan sudah dapat membantu terciptanya perbaikan kualitas kebersihan lingkungan dengan cukup signifikan.
 - c. Hasil/Manfaat yang Dirasakan oleh Masyarakat Dari Partisipasi Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Masyarakat merasakan hasilnya dengan cukup baik dalam sektor ekonomi dan psikologis.
 - d. Penghargaan Bagi *Stakeholders* yang Telah Berpartisipasi atau Berhasil Melakukan Program Pengelolaan Sampah: *Stakeholders* ada yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi karena berhasil melakukan program pengelolaan sampah. Namun, di sisi lain tidak ada pemberian penghargaan oleh Pemerintah Kota Cirebon kepada perusahaan yang telah berpartisipasi melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk pengelolaan sampah.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

a. Faktor Pendukung Pemerintah Kota:

- Ketersediaan dan kejelasan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota

b. Faktor Pendukung *Stakeholders* Lainnya:

- Adanya program pada bidang lingkungan
- Ketersediaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Kesadaran *stakeholders* lainnya untuk melakukan kolaborasi dalam pengangkutan sampah

c. Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dan *Stakeholders* Lainnya:

- Minimnya kesadaran perusahaan
- Keterbatasan data akan perusahaan yang sudah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Belum dilaksanakannya *reward and punishment* pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah
- Rendahnya komitmen kepemimpinan ketua RW terhadap program bank sampah
- Sulitnya merubah *mindset* masyarakat akan pengelolaan sampah

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon belum optimal. Oleh karena itu, peneliti menyarankan dengan sebagai berikut:

1) Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

a. Untuk mengoptimalkan kriteria *Input* berupa:

- *Stakeholders* lainnya yang belum menjalankan komitmen terhadap permasalahan sampah, DLH Kota Cirebon perlu untuk memberikan pemahaman bersama dengan rutin kepada para perusahaan dan pelaku usaha akan urgensi masalah sampah.
- Pemahaman *stakeholders* yang bersikap tidak peduli akan peraturan kolaborasi pengelolaan sampah, DLH Kota Cirebon perlu menegakkan Perda dan Perwal tentang pengelolaan sampah serta Perda dan Perwal tentang TJSL kepada para perusahaan dan pelaku usaha.
- Pelaku usaha yang tidak bergantung dalam pengangkutan sampah dengan DLH Kota Cirebon, maka DLH Kota Cirebon perlu untuk terus mendorong agar para pelaku usaha melakukan kolaborasi pengangkutan sampah karena terdapat peraturan yang mengharuskan pelaku usaha berkolaborasi dalam pengangkutan sampah.
- Anggaran pengelolaan sampah yang belum optimal, DLH Kota Cirebon perlu untuk mengoptimalkan dalam pendapatan retribusi daerah yang didapatkan dari retribusi pelayanan kebersihan pengangkutan sampah.

- Sarana dan prasarana yang belum optimal, DLH Kota Cirebon perlu untuk mengajukan proposal kepada perusahaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan pengadaan sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat lebih efektif.
- b. Untuk mengoptimalkan kriteria *Process* berupa:
- Masih banyak ditemukan *stakeholders* lainnya yang belum berkomitmen untuk berkolaborasi dengan DLH Kota Cirebon, maka perlu dilakukan pendekatan yang intensif oleh Tim Fasilitasi TJSL yang merupakan representasi Pemkot kepada para perusahaan agar keuntungan TJSL sebesar 2,5 % nya dapat dialokasikan untuk program bina lingkungan.
 - Kemampuan pimpinan dari ketua RW yang kurang aktif dan inisiatif akan program bank sampah, maka perlu untuk diberikan pemahaman dan pendampingan yang intensif akan program bank sampah oleh DLH Kota Cirebon agar jumlah bank sampah yang aktif dapat meningkat.
- c. Untuk mengoptimalkan kriteria *Outcomes* berupa:
- Mutu pengelolaan sampah yang belum optimal karena kualitas Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga belum mencapai target yang tercantum di dalam Perwal, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan agar dapat menerapkan prinsip 3R dengan baik.

2) Faktor Penghambat Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dan *stakeholders* lainnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan dengan sebagai berikut:

- Minimnya kesadaran perusahaan dan keterbatasan sarana prasarana untuk pengangkutan sampah. DLH Kota Cirebon perlu melakukan pendekatan secara personal kepada perusahaan dengan mengajukan hal yang dibutuhkan, dimana hal ini nantinya dapat membangun kesadaran perusahaan agar tergerak untuk melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya di bidang bina lingkungan yang berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana seperti pendirian bank sampah dan kendaraan pengangkut sampah sehingga jumlah sarana dan prasarana dapat meningkat dan membantu untuk mengatasi keterlambatan pengangkutan sampah kepada para pelaku usaha yang telah melakukan kolaborasi dengan DLH Kota Cirebon.
- Keterbatasan data akan perusahaan yang sudah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pemerintah Kota Cirebon perlu menegaskan sosialisasi kepada perusahaan terkait kewajibannya yang tercantum dalam Perda tentang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu untuk menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak melakukan program tersebut secara langsung kepada masyarakat, tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota

Cirebon sehingga pihak pemerintah memiliki kelengkapan data akan perusahaan yang telah menjalankan program tersebut.

- Belum dilaksanakannya *reward and punishment* pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pemerintah Kota Cirebon perlu untuk bersikap proaktif dengan menegaskan pelaksanaan *reward* (penghargaan) kepada perusahaan yang telah melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sehingga pihak perusahaan merasa diakui dan termotivasi untuk terus berkomitmen dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, menegaskan *punishment* (teguran atau hukuman) kepada perusahaan yang tidak melaksanakan program tersebut. Pemerintah harus dapat memanfaatkan kekuatan untuk dapat mengatur pihak perusahaan dengan tegas karena sistem *reward and punishment* sudah tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Rendahnya komitmen kepemimpinan ketua RW terhadap program bank sampah. Pemerintah Kota Cirebon c.q Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon perlu melakukan pendekatan secara intensif untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada ketua RW di Kota Cirebon yang belum mendirikan bank sampah. Ketua RW menjadi sosok pemimpin yang yang memiliki peran yang sangat berpengaruh akan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya dalam keberlangsungan bank sampah.
- Sulitnya merubah *mindset* masyarakat akan pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Cirebon c.q Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon perlu

melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menarik perhatian, dan secara berkesinambungan untuk mampu merubah *mindset* atau masyarakat hingga tercapai perilaku masyarakat mengenai kesadaran akan pengelolaan sampah dan juga berbagai manfaat dari bank sampah.